

BAB IV

SIMPULAN

4.1. Simpulan

Berdasarkan tinjauan penulis atas realisasi anggaran belanja BPKAD Kota Blitar Tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020

Pada pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB III terkait alokasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan BPKAD Kota Blitar tahun 2020. Atas teori kebijakan yang berlaku, penulis membedakan alokasi anggaran berdasarkan jenis akun belanja yang dapat diklasifikasikan menjadi belanja pegawai sebesar Rp1.100.966.500,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp8.667.015.003,00; dan belanja modal sebesar Rp1.007.487.900,00.

Sementara realisasi anggaran berdasarkan pada program dan kegiatan yang terdiri dari 9 (sembilan) program yang dirinci pada beberapa kegiatan. Program yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut: program pelayanan perkantoran sebesar Rp4.385.890.700,00; program peningkatan kapasitas perangkat daerah sebesar Rp83.505.200,00; program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar

Rp5.000.000,00; program peningkatan dan pengembangan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah sebesar Rp543.249.547,00; program perencanaan pengembangan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah sebesar Rp1.184.280.550,00; program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp1.390.093.281,00; program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah sebesar Rp2.707.957.250,00; program peningkatan dan pengembangan perencanaan keuangan daerah sebesar Rp1.298.146.631,00; dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan akuntansi daerah sebesar Rp459.181.800,00.

2. Realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020

Berdasarkan pembahasan terkait realisasi anggaran belanja BPKAD Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB III, pada anggaran belanja telah direalisasikan dengan baik yang dibedakan menurut akun belanja dan program kegiatan. Menurut realisasi anggaran belanja yang berdasarkan jenis akun belanja, realisasi tertinggi pada belanja modal mencapai 97,41% yang menunjukkan realisasi anggaran cukup efisien. Capaian realisasi anggaran sebesar 91,29% pada belanja barang dan jasa, kemudian realisasi anggaran belanja pegawai sebesar 86,62%.

Realisasi anggaran belanja atas klasifikasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan sudah terealisasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian presentase program yang berjumlah 5 (lima) dari jumlah keseluruhan mencapai 9 (sembilan) program diantaranya pada program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 99,99%; pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan akuntansi daerah sebesar 99,32%; program peningkatan dan pengembangan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah sebesar 99,04%; program perencanaan pengembangan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah mencapai 96,89%; dan program pelayanan perkantoran sebesar 90,39%. Sedangkan program dengan realisasi yang kurang dari 90% diantaranya program peningkatan kapasitas perangkat daerah sebesar 87,47%; program pengelolaan pendapatan daerah dengan presentase 87,46%; program peningkatan dan pengembangan perencanaan keuangan daerah dengan besaran 83%; serta program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset mencapai 80,48% menjadi presentase realisasi anggaran belanja yang terendah.

Berdasarkan tinjauan terhadap BPKAD Kota Blitar, pelaksanaan realisasi anggaran telah direalisasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam hal teknis pencatatan struktur belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atas belanja tidak langsung pada SKPD hanya terdiri atas belanja pegawai sedangkan pada DPA sesuai dengan peran BPKAD Kota Blitar selaku SKPD maupun BPKAD, maka dilakukan penyesuaian dengan rincian tabel pada pembahasan BAB III.

3. Kendala dan/atau permasalahan terkait realisasi anggaran belanja yang dihadapi BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020

Terkait kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kota Blitar pada tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan pada BAB III bahwa pada periode tahun anggaran 2020 perlu melakukan penyesuaian atas perubahan kebijakan akibat adanya Pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan tersebut akan memperlambat pelaksanaannya karena perlu penyesuaian pada prosedur yang berlaku. Selain itu, pegawai terkait perlu melakukan rasionalisasi dan *refocussing* atas realisasi anggaran karena tentu terdapat perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitupun dengan harga yang mengalami pergeseran pada Dokumen Perubahan Anggaran, perubahan harga dalam hal ini disesuaikan dengan perubahan harga riil. Selanjutnya, terkait penggunaan aplikasi daring *e-purchasing* yang bisa saja mengalami *server down* karena banyaknya *server* yang mengakses secara bersamaan. Tidak diadakannya sistem lelang pada BPKAD Kota Blitar karena nilai aset tidak mencapai batasannya.

4.2. Saran

Berdasarkan tinjauan penulis terkait realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Blitar tahun anggaran 2020, penulis memberikan saran kepada SKPD tersebut sebagai berikut.

1. Atas adanya kebijakan yang mengalami perubahan akibat pandemi walaupun sistem atau prosedur biasanya dapat dipraktikkan setelah instruksi dari pemerintah yang terkait, sebaiknya tetap mengikuti apapun perubahan atas

peraturan tersebut dengan baik meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi dengan begitu dapat menambah pengetahuan dan kemampuan baru, serta penyesuaian instansi terhadap pergolakan kebijakan bahkan dirasakan juga oleh negara lain. Dengan begitu semakin dapat menyelesaikan segala kendala/permasalahan ketika pandemi masih berlangsung.

2. Perlunya rasionalisasi dan *refocussing* anggaran yang akan mempengaruhi pelaksanaan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan sehingga capaian kinerja BPKAD Kota Blitar dapat terpenihi berdasarkan penetapan target. Sebaiknya dengan kemampuan terkait anggaran saat ini, BPKAD Kota Blitar dapat melaksanakan kegiatan terkait anggaran lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
3. Sebaiknya perlu dilakukan pengoptimalan pada aplikasi terkait sehingga kinerja pada belanja modal jauh lebih efektif.